

Pemulihan Industri Pariwisata di Kota Makassar Pasca Pandemi COVID-19

Regina^{1*}, Irwandi², Annisa Paramaswary Aslam³, Muhammad Syafii A. Basalamah⁴

Email korespondensi : regina@unm.ac.id

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia^{1,2}

Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar, Indonesia³

Program Studi Manajemen, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia⁴

Abstract

This research employs a literature study method focused on the revitalization of the tourism industry in Makassar during the Covid-19 pandemic. The data used are derived from nationally and internationally recognized sources. The study was conducted through manual research, utilizing data collected from Google Scholar and Mendeley to address information gaps related to the challenges faced by the tourism sector before and after the pandemic. The impact of Covid-19 on the population of Makassar City is evident in the significant decline in both international and domestic travel. The number of tourist visits—both domestic and foreign—decreased substantially. A crucial first step in improving employment conditions in the tourism sector is addressing issues in the transportation sector, including the availability of lodging and food services. The Covid-19 pandemic severely disrupted the national economy. Tourism, which plays an essential role in human life as a means to relieve stress and fatigue from work, was among the most affected sectors. Various economic analyses have shown that tourism was one of the hardest-hit industries. While tourism has the potential to support the broader community economy, the overall economic downturn has negatively impacted the tourism sector at both macro and micro levels.

Keyword: Covid-19, Domestic tourism, Economic impact, Literature study, Recovery, Tourism industry

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Tahun 2020 akan selalu dikenang sebagai masa ketika dunia dihantam oleh wabah global yang melumpuhkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Wabah tersebut adalah Covid-19, atau penyakit virus corona 2019, yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020). Hingga pertengahan Mei 2020, tercatat lebih dari 4,3 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia, dengan angka kematian melebihi 292 ribu jiwa sejak Januari 2020 (Worldometer, 2020). Angka tersebut pun diperkirakan akan terus meningkat.

Pandemi ini memicu respons global yang sangat luas dan terkoordinasi, menjadi salah satu mobilisasi kesehatan terbesar dalam sejarah modern. Pemerintah dari berbagai negara berupaya keras membatasi penyebaran virus melalui peningkatan layanan kesehatan dan kebijakan medis yang ketat. Para ahli kesehatan masyarakat menyarankan pengurangan interaksi sosial sebagai strategi utama untuk menekan penyebaran virus.

Salah satu kampanye global yang terkenal pada masa itu adalah *Flatten the Curve*, sebuah gerakan internasional berbasis media sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperlambat laju penularan Covid-19. Sepanjang tahun 2020, berbagai strategi seperti karantina wilayah (lockdown), pembatasan mobilitas, promosi gaya hidup sehat dan aman, serta kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi bagian dari norma kehidupan baru di seluruh dunia (Menkes RI, 2020; WHO, 2020).

Tidak dapat dipungkiri, situasi pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi global. Berdasarkan hasil analisis dari Roland Berger GmbH (2020) dan Code (2020), sektor pariwisata menjadi salah satu industri yang paling terdampak. Pembatasan mobilitas, larangan bepergian, serta imbauan untuk menghindari kerumunan membuat banyak calon wisatawan membatalkan rencana kunjungan mereka ke berbagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus di area terpencil, banyak ODTW akhirnya ditutup sementara untuk umum, sesuai dengan arahan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO/WHO, 2020). Langkah ini memang penting dari segi kesehatan masyarakat, namun turut memperparah kontraksi ekonomi di sektor pariwisata.

Diperkirakan pada tahun 2020, partisipasi tenaga kerja internasional akan meningkat antara 20% hingga 30%. Namun, dalam skenario terburuk, kerugian yang ditimbulkan pada sektor pariwisata internasional dapat mencapai antara 300 hingga 450 juta USD. Angka ini setara dengan sekitar seperlima dari total potensi kerugian global yang diperkirakan mencapai 1,5 triliun USD.

Dalam skenario terburuk, keindahan alam yang menjadi daya tarik utama berbagai destinasi wisata di dunia tidak lagi mampu mendatangkan wisatawan. Padahal, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga (Wirawan, 2016), pariwisata berkontribusi besar terhadap output ekonomi nasional.

Namun, penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas ke berbagai wilayah telah menurunkan standar hidup masyarakat di seluruh dunia. Dampaknya sangat dirasakan di tingkat lokal, terutama karena tingginya angka kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengumumkan status darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan International Health Regulations (IHR) yang berlaku sejak 2005 (Wahyuni et al., 2021).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi pendorong pembangunan nasional—melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, dan perolehan devisa—mengalami kemunduran drastis. Jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia pada tahun 2020–2021 hanya mencapai 4,02 juta orang. Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatat 16,11 juta kunjungan, atau mengalami penurunan sekitar 75,03% (BPS, 2021).

Sebagai upaya pemulihan, pemerintah pusat dan daerah menjalin kerja sama dalam berbagai program pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penguatan perekonomian di Kota Makassar sebagai bagian dari strategi pemulihan nasional. Meski demikian, tekanan ekonomi akibat pandemi telah memicu munculnya sikap apatis, bahkan penolakan, dari sebagian masyarakat. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja asing yang masuk melalui Pintu Makassar pada tahun 2021 tercatat nol (Imran Tajuddin, 2021).

Perlu diingat bahwa pariwisata merupakan sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling terhubung dan saling mendukung. Komponen tersebut mencakup penyedia jasa wisata, agen perjalanan, hingga operator tur (Wirawan, 2016). Oleh karena itu, pemulihan sektor ini harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan semua aspek yang terlibat di dalamnya.

Pariwisata merupakan suatu jenis aktivitas yang mempersatukan masyarakat umum dan dunia usaha. Pariwisata, terdiri dari Undang-Undang Kepariwisata, adalah kegiatan wisata yang berdasarkan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dimuliskan fasilitas dan layanan yang disediakan. Pariwisata disebut sebagai

industri karena banyak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian berupa kontribusi terhadap pendapatan nasional. Wisata juga menawarkan keuntungan dalam hal peluang investasi, jam kerja, dan kenaikan gaji. Secara geografi, wisata merupakan bagian dari pendekatan kewilayahan, dimana ciri yang paling menonjol adalah wisata kota (Sejati et al., 2022).

Salah satu tindakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi dampak Covid-19 adalah penerapan pembatasan sosial atau *physical distancing* ini mencakup praktik menjaga jarak dengan orang asing, dan kebijakan ini terbukti efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Pada tahap awal Covid-19, masyarakat disarankan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bahkan melakukan pekerjaan dari rumah. Bekerja dari rumah direkomendasikan bagi karyawan di industri pariwisata, khususnya mereka yang sensitif terhadap pendapatan sehari-hari. Tidak tepat jika menangani transaksi secara monoton, seperti penjualan cinderamata, PKL, jasa biro perjalanan, dan usaha terkait pariwisata lainnya. Penurunan jumlah wisatawan ke Indonesia diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 (Desy Tri Anggarini, 2021).

Gagasan utama pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 adalah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang AKB; misalnya, ketika PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dilakukan, banyak orang yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Menyusul epidemi Covid-19, kewaspadaan harus dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Kanasari et al., 2021).

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar. Provinsi ini menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia karena topografinya yang beragam, sumber daya alam yang melimpah, dan iklim yang sejuk. Selain itu, kawasan ini memiliki fasilitas yang luas untuk menampung pengunjung. Namun data statistik keanggotaan Wisman Mancanegara (Wisman) dalam kurun waktu beberapa tahun menunjukkan fluktuasi hingga tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi Wisman Mancanegara (Hasdiansa et al., 2023). Pertumbuhan yang sangat begitu pesat para pariwisata awalnya akan melemah dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 belum mencapai titik kritis (Adam & Info, 2022).

Pemulihan pariwisata segera dilakukan. Dimana pariwisata salah satu sektor yang terdampak paling awal dari kasus Covid-19 (Kemenparekraf, 2020). Menurut (Effendi et al., 2020), Covid-19 memberikan efek negatif pada industri pariwisata Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh usaha kecil dan menengah. Hingga tahun 2019 (Hasdiansa et al., 2023), terdapat 17.771 orang yang melakukan perjalanan ke Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2020, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 3.598 orang (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 100 persen. Pandemi Covid-19 yang diawali pada bulan Maret 2020 berdampak signifikan terhadap partisipasi perempuan. Pasca pandemi Covid-19, beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah impor mancanegara. Namun berbagai langkah juga dilakukan untuk mendukung perekonomian Indonesia yang terkena dampak buruk Covid-19, termasuk sektor pariwisata.

Tabel 1 Jumlah Wisatawan di Makassar (2022)

Kebangsaan	Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Pintu Makassar menurut Kebangsaan												Tahun
	2022												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Singapura	0	0	0	0	0	0	3	1	1	15	40	0	60
Malaysia	0	0	0	163	320	434	595	345	407	385	322	0	2971
Philipina	0	0	0	0	2	0	2	1	0	3	1	0	9
Thailand	0	0	0	0	0	0	2	21	2	5	4	0	34
Jepang	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	7
Korea Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Taiwan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
China	0	0	0	0	0	0	0	0	184	350	3	0	537
India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
Hongkong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Australia	0	0	0	0	1	1	0	2	0	9	6	0	19
Amerika Serikat	0	0	0	0	9	12	2	29	4	8	21	0	85
Inggris	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	7	0	13
Belanda	0	0	0	0	0	2	9	4	2	8	4	0	29
Jerman	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	1	0	26
Prancis	0	0	0	0	0	0	6	3	5	3	14	0	31
Switzerland	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
Rusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Saudi Arabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3831

Sumber Data diolah Peneliti dari BPS (2022)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan jumlah kedatangan wisatawan ke Sulawesi Selatan pada tahun 2022–2023. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap peningkatan fasilitas penginapan bagi para wisatawan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ragam layanan dan kualitas, termasuk penambahan jumlah kamar hotel dan akomodasi lainnya. Akomodasi berperan penting dalam menyediakan fasilitas yang aman, terawat, dan menunjang kerja sama tim, yang berdampak positif bagi pekerja maupun wisatawan. Oleh karena itu, keberadaan hotel menjadi salah satu indikator penting dalam penelitian untuk menentukan tingkat kunjungan wisatawan ke suatu wilayah (Hasdiansa et al., 2023).

Berbagai studi mengenai pengembangan sektor pariwisata telah banyak dilakukan. Sebagai kelanjutannya, studi ini memfokuskan perhatian pada dinamika penyebaran pariwisata selama pandemi Covid-19, yang dimulai pada Maret 2020 dan masih menunjukkan dampaknya hingga kini. Sektor pariwisata mengalami kemunduran signifikan akibat pandemi yang memicu pembatasan mobilitas publik secara luas dan berdampak drastis pada pendapatan industri pariwisata.

Namun, sebagai destinasi wisata terpopuler kedua di Indonesia setelah Bali, Kota Makassar tetap menunjukkan peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat lokal. Oleh sebab itu, upaya revitalisasi dan adaptasi pariwisata Makassar selama masa pandemi menjadi sorotan utama dalam penelitian ini (Wahyuni et al., 2021).

Fokus utama studi ini terletak pada konteks krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19, yang secara tiba-tiba melumpuhkan sektor pariwisata di seluruh dunia, termasuk di Kota Makassar. Berbeda dengan krisis ekonomi atau bencana alam yang telah memiliki pola penanganan yang dapat diprediksi,

pandemi ini menciptakan tantangan multidimensi yang kompleks dan belum pernah dihadapi oleh para pelaku industri pariwisata lokal.

Oleh karena itu, studi ini menawarkan perspektif baru terhadap strategi pemulihan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat pasca pandemi. Selain itu, penelitian ini turut mengisi kesenjangan literatur mengenai dinamika kebijakan dan adaptasi sektor pariwisata di kota berkembang saat menghadapi krisis kesehatan global. Dengan menyajikan data kontekstual dan strategi adaptif dari pengalaman nyata di Kota Makassar, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam kajian pariwisata krisis.

Tinjauan Pustaka

Pariwisata

Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menghadapi kelelahan, kejenuhan, dan tekanan akibat rutinitas pekerjaan adalah dengan melakukan liburan atau *refreshing*. Aktivitas ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari lingkungan sehari-hari ke suasana yang berbeda, memberikan efek penyegaran yang berdampak positif terhadap kesejahteraan psikologis maupun produktivitas kerja. Salah satu cara paling umum untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui kegiatan pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, sektor pariwisata mencakup seluruh aspek kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata, termasuk penjualan objek wisata, tarif harian, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang menopang industri ini (Pariwisata, 2013).

Secara epistemologis, istilah *pariwisata* berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Abdurachmat & Maryani (1997), kata "pari" berarti menyeluruh, berulang, atau mengelilingi, sedangkan "wisata" berarti perjalanan. Gabungan kedua kata tersebut kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris sebagai *travel*. Dengan demikian, pariwisata dapat dimaknai sebagai aktivitas bepergian dari satu tempat ke tempat lain (Pariwisata, 2013). Marpaung juga menekankan bahwa pariwisata adalah bentuk perpindahan sementara seseorang dari lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan untuk tujuan rekreasi. Selama berada di destinasi wisata, individu tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas, dan beragam fasilitas disediakan untuk memenuhinya (Pariwisata, 2013).

Sementara itu, Lili Adi Wibowo (2008) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan kesenangan. Ia menjelaskan lebih jauh bahwa secara etimologis, kata "pariwisata" terdiri dari tiga unsur: "pari" yang berarti banyak atau berulang, "wis" yang merujuk pada tempat tinggal atau komunitas, dan "ata" yang berarti menjelajah atau mengembara terus-menerus. Pada awal 1960-an, Presiden Soekarno bahkan menganjurkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX, selaku Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (DTI), untuk secara resmi menggunakan istilah *pariwisata* sebagai padanan dari konsep *tourism*.

Seiring waktu, konsep dan pengertian pariwisata terus berkembang. Secara umum, terdapat kesamaan dalam pemahaman bahwa pariwisata adalah kebutuhan manusia untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan merasakan secara langsung keindahan suatu destinasi. Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap komponen tertentu dalam definisi tersebut, yang dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang, konteks, atau kepentingan yang melatarbelakanginya (Lili Adi Wibowo, 2008).

Pemulihan Pariwisata

Upaya hukum merupakan metode yang digunakan oleh pengadilan untuk menegakkan hak, menjatuhkan hukuman, atau mengeluarkan perintah tertentu. Dalam tradisi hukum Inggris dan Amerika Serikat, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa "di balik setiap hak, terdapat upaya hukum; jika tidak ada upaya hukum, maka hak itu tidak nyata." Dengan kata lain, suatu hak menjadi tidak bermakna apabila tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilikinya (Blackstone W., 1830). Dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas pemulihan hukum yang efektif,

terlepas dari apakah pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat negara atau bukan. Negara diwajibkan untuk menjamin bahwa tuntutan pemulihan dapat diproses oleh badan yudisial, administratif, atau legislatif yang kompeten, serta menyediakan berbagai opsi pemulihan hukum. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa putusan pemulihan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang.

Di sisi lain, pemeliharaan kelestarian alam membutuhkan pengelolaan yang tepat dan berbasis pada paradigma ekologis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar destinasi wisata, memainkan peran penting dalam mengelola, melestarikan, dan mengembangkan kawasan wisata yang memiliki nilai potensial (Wisnu Hadi, 2020). Di Indonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (I Wayan Wiwin et al., 2018). Namun, pariwisata berbasis alam juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal dampak lingkungan (Jamalina & Wardani, 2017). Meskipun demikian, beberapa ahli percaya bahwa terdapat peluang untuk memperbaiki kondisi lingkungan melalui promosi pariwisata yang berkelanjutan, sehingga aktivitas manusia dan pelestarian alam dapat berjalan seiring (Chazdon et al., 2020).

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait upaya pemulihan sektor pariwisata. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pemulihan pariwisata selama masa pandemi Covid-19, yang dimulai pada Maret 2020 dan masih terus berlanjut. Pandemi serta kebijakan pembatasan mobilitas terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan di sektor ini (Wahyuni et al., 2021).

Keberhasilan Pengembangan Objek Wisata

Menurut *Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005–2009*, keberhasilan dalam mempromosikan pariwisata sebagai sumber devisa negara dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

- a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,
- b. Jumlah pengeluaran harian dan total belanja wisatawan asing, dan
- c. Lama tinggal wisatawan selama berada di Indonesia.

Lebih lanjut, menurut *Pariwisata* (2013), keberhasilan suatu wilayah dalam mengembangkan dirinya sebagai destinasi wisata sangat bergantung pada tiga elemen utama yang dikenal sebagai "3A": *atraksi* (daya tarik), *aksesibilitas* (kemudahan untuk dicapai), dan *amenitas* (ketersediaan fasilitas pendukung).

Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu daerah sebagai destinasi wisata yang ideal antara lain mencakup:

- a. Kemudahan akses menuju lokasi wisata,
- b. Daya tarik yang dapat dinikmati wisatawan,
- c. Fasilitas yang fungsional dan mudah digunakan,
- d. Ketersediaan barang atau jasa yang mendukung kebutuhan wisatawan, dan
- e. Akomodasi yang layak dan nyaman untuk menginap.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, keberhasilan pengembangan suatu destinasi wisata dapat diukur dari meningkatnya jumlah pengunjung, meningkatnya daya tarik destinasi baik secara kualitas maupun kuantitas, serta bertambahnya pendapatan ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata di kawasan tersebut (Pariwisata, 2013).

Metode Analisis

Metode penelitian *literature review* merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan suatu topik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perkembangan teori, temuan empiris, serta mengidentifikasi celah (*research gap*) yang masih terbuka dalam suatu bidang studi.

Menurut Snyder (2019), *literature review* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti *systematic review*, *narrative review*, dan *scoping review*, tergantung pada

tujuan dan cakupan analisis yang ingin dicapai. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung, melainkan mengandalkan sumber-sumber sekunder yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, prosiding konferensi, laporan institusi, dan buku akademik.

Melalui metode literature review, peneliti dapat merancang kerangka teoretis yang solid, merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam, serta menegaskan *novelty* atau kebaruan dari studi yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian berdiri di atas fondasi ilmiah yang kuat dan relevan dengan perkembangan keilmuan terkini.

Dalam konteks penelitian ini, kajian literatur dilakukan secara manual menggunakan sumber data dari Google Scholar dan Mendeley. Proses ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi mengenai tantangan dan dinamika sektor pariwisata sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas strategi revitalisasi industri pariwisata di Kota Makassar selama masa pandemi.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suharsono et al., 2021), strategi pengelolaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat setelah pandemi Covid-19 mengeksplorasi topik-topik seperti pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, keberlanjutan destinasi pariwisata, dan peran pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, kondisi mulai membaik secara signifikan, memungkinkan pelaku pariwisata untuk mempromosikan kembali destinasi mereka dengan menawarkan berbagai insentif menarik bagi pelancong domestik, termasuk sertifikat hadiah dan barang-barang menarik lainnya.

Selanjutnya, menurut (Suharsono et al., 2021), setiap usaha memerlukan strategi pemasaran atau promosi untuk mengenalkan barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada khalayak luas. Ini juga bertujuan untuk menarik minat calon konsumen agar menggunakan barang dan jasa mereka, serta mengunjungi berbagai destinasi wisata, restoran, hotel, dan tempat menarik lainnya yang tersedia di Kota Makassar. Semua perusahaan, tanpa kecuali, memerlukan upaya promosi untuk meningkatkan visibilitas mereka di kalangan masyarakat, seperti melalui pembuatan iklan yang menawarkan beragam penawaran menarik dan bersaing.

Konsep Kepariwisata

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wilopo & Hakim, 2017), pariwisata mencakup konsep atau rentang makna dari beberapa definisi sebelumnya, termasuk perjalanan, wisata, dan turisme. Pariwisata melibatkan segala kegiatan wisata yang dilakukan oleh para pengunjung didukung oleh infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Meskipun demikian, unsur paling vital dalam pertumbuhan pariwisata adalah daya tarik wisata. Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) mengacu pada sekelompok struktur dan fasilitas yang saling terhubung, menjadi dorongan bagi para wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah atau lokasi tertentu. Terdapat tiga kategori objek wisata, yakni objek wisata alam atau lingkungan (ekowisata), objek wisata sosial-budaya, serta objek wisata minat khusus.

(Cooper et al., 1993) menjelaskan pariwisata sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan perjalanan sementara ke destinasi di luar tempat tinggal atau kantor, masa tinggal sementara di tempat tujuan, dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk melengkapi keinginan para wisatawan. Selanjutnya, (Leiper, 1989) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata terdiri dari beberapa komponen utama, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wisatawan berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Bepergian adalah pengalaman manusia yang memungkinkan orang untuk menghargai,

- mengantisipasi, dan mengingat kembali momen-momen khusus dalam hidup mereka.
2. Aspek geografis, dimana mobilitas pengunjung terjadi pada tiga lokasi geografis, yaitu: Pertama, pengunjung merupakan partisipan dalam kegiatan pariwisata. Berwisata menjadi pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengenang peristiwa-peristiwa kehidupan. Kedua, aspek geografi, dimana mobilitas wisatawan terjadi pada tiga lokasi geografis, yaitu:
 - a. Daerah asal wisatawan, di mana wisatawan melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas tersebut menjadi pendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Seorang wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai barang dan tempat menarik di daerahnya, melakukan pemesanan, dan berangkat ke tempat tujuan.
 - b. Zona transit. Tidak semua wisatawan diharuskan untuk mengunjungi wilayah tersebut. Namun, karena semua wisatawan pasti akan melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut, fungsi daerah transit sama pentingnya. Perjalanan wisatawan sering kali berakhir di zona transit daripada di tempat tujuan.
 - c. Tempat wisata atau pendorong pariwisata. Tempat wisata menjadi motor penggerak sektor pariwisata secara menyeluruh dengan menciptakan permintaan perjalanan dari tempat asal para wisatawan. Tempat wisata juga merupakan pemicu utama pertumbuhan pariwisata yang memberikan pengalaman yang unik di luar rutinitas para pelancong.
 3. Industri pariwisata merupakan sektor yang menyediakan daya tarik, pelayanan, dan fasilitas untuk para wisatawan. Industri ini terbagi menjadi tiga wilayah geografis yang berbeda. Contohnya, agen perjalanan berada di wilayah asal para wisatawan, penerbangan terletak di wilayah asal dan juga transit para wisatawan, sedangkan perumahan berlokasi di destinasi wisata itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pelestarian lingkungan hidup, serta pelestarian dan pemajuan budaya (Wahyuni et al., 2021).

Cooper et al. (1993) menyatakan bahwa pengembangan destinasi wisata sangat bergantung pada sejumlah elemen kunci. Pertama, *daya tarik wisata* merupakan elemen utama yang mendorong kesadaran wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik ini bisa berupa atraksi luar ruangan seperti pegunungan, pantai, atau bukit, maupun atraksi dalam ruangan seperti rumah adat, situs sejarah, kesenian, kerajinan, ritual, festival, atau kegiatan sosial budaya masyarakat lokal (Suwena, 2010).

Kedua, aspek *aksesibilitas* mencakup kemudahan dalam mengakses destinasi wisata melalui sistem transportasi yang efektif. Faktor-faktor seperti petunjuk arah, keberadaan bandara atau terminal, durasi perjalanan, biaya, frekuensi transportasi, serta ketersediaan fasilitas pendukung menjadi bagian penting dalam menunjang kemudahan akses wisatawan (French, 1996 dalam Sunaryo, 2010).

Ketiga, *amenitas* atau fasilitas pendukung pariwisata meliputi tempat penginapan, restoran, pusat hiburan, dan lokasi belanja yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Keempat, *layanan pelengkap* atau fasilitas umum seperti perbankan, ATM, layanan telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, dan sebagainya) juga memainkan peran penting dalam menunjang kegiatan wisata. Fasilitas ini membantu kelancaran aktivitas wisata dan meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan (Sunaryo, 2010).

Kelima, keberadaan *lembaga pendukung* yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam mengelola sektor pariwisata menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan kepariwisataan. Lembaga-lembaga ini secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen utama: masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran sinergis dalam mendukung kemajuan industri pariwisata secara berkelanjutan (Pitana, 2005).

Pembahasan

Pemulihan Bencana Covid-19 dan Pariwisata

Bencana menurut (Priambodo, 2009) digambarkan sebagai suatu jenis kejadian yang tidak menguntungkan. Disebabkan oleh alam, aktivitas manusia atau interaksi antara dua orang atau lebih, yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup. Ada empat jenis bencana yang didefinisikan dalam UU Bencana No. 24/2007: bencana alkase, non-alkase, dan bencana sosial. Berdasarkan definisi tersebut, Covid-19 merupakan reservoir non-basa. Covid-19 merupakan Non-Alam Bencana, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Pengalihan Non-Alam Bencana ke Bencana Nasional.

Lebih lanjut, penelitian (Priambodo, 2009) mengenai katarak non-alkalin akibat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa katarak tersebut semakin meningkatkan jumlah kasus, sehingga memerlukan pengembangan wilayah daratan yang terpapar bencana dan berdampak pada kondisi eksternal Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, wabah Covid-19 perlu diatasi secepatnya. Fungsi penanggulangan bencana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara, masyarakat, kelompok, dan individu dengan tujuan memulihkan, membangun kembali, atau menghidupkan kembali segala sesuatu yang hilang akibat peristiwa bencana (Coppola, 2006).

"Pemulihan bisa diprediksi, terdiri dari bagian-bagian yang bisa diidentifikasi yang terjadi secara berurutan," dari Haas, Kates, and Bowden (Herdiana, 2020). Pilihan serta keputusan dibuat oleh hukum, serta hasilnya menunjukkan bahwa kembalinya keadaan normal atau aspek kehidupan yang baru dan segar dikaitkan dengan ketekunan." Dalam skenario ini, penerapan Covid-19 ialah upaya untuk merampungkan pertarungan sesegera mungkin, bahkan mungkin sebelum permasalahan tersebut menjadi serius.

Sebagaimana dijelaskan (Kemenparekraf, 2020), pemekaran sektor pariwisata merupakan upaya memulihkan kondisi sektor tersebut sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Kemenparekraf/Baparekraf menekankan bahwa ada tiga langkah kunci yang perlu diambil untuk menyelamatkan pariwisata menjadi respons terhadap akibat pandemi Covid-19, yaitu tahap tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Awal tanggap darurat difokuskan di aspek kesehatan, melibatkan langkah-langkah seperti pengembangan program proteksi sosial, peningkatan kreativitas dan produksi, koordinasi krisis pariwisata dengan destinasi pariwisata, serta perencanaan untuk fase pemulihan.

Proses rehabilitasi dilakukan seiring dengan dibukanya kembali lokasi-lokasi wisata secara bertahap. Mulai dari menetapkan norma kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (CHSE) di lokasi wisata. Sehingga membantu optimalisasi kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE), persiapan dimulai. Selama fase normalisasi, venue dilengkapi dengan prosedur CHSE, minat pasar ditingkatkan, dan diskon untuk paket perjalanan dan MICE diberikan.

Kunci mendasar dari pemulihan pariwisata dalam penerapan ketiga fase tersebut adalah inovasi, kemampuan beradaptasi, dan kerja sama tim. Perubahan penting yang harus diupayakan disebut sebagai inovasi. Diperlukan inovasi infrastruktur, kelembagaan, budaya, gastronomi, dan fesyen dalam pariwisata. Adaptasi mengacu pada penyesuaian diri dengan keadaan pandemi Covid-19. Sementara itu, kerja sama mengandung arti bahwa semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memulihkan keadaan pariwisata seperti sebelum pandemi Covid-19 (Wahyuni et al., 2021).

Kondisi Pariwisata Makassar Selama Pandemi Covid-19

Menurut sumber dari Wikipedia bahasa Indonesia (Azwar Hayat, 2020), Sulawesi Selatan diakui sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat skrining Covid-19 yang tinggi, seperti terlihat dari data pasien yang terkonfirmasi positif virus tersebut. Pada awal Juni 2020, terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 di wilayah ini, dengan lebih dari 100 orang terinfeksi. Walaupun pemerintah provinsi telah menerapkan program kesejahteraan sosial secara besar-besaran untuk mengurangi jumlah kasus COVID-19, namun hingga saat itu, belum ada penurunan signifikan dalam penyebaran penyakit tersebut.

Berdasarkan laporan Covid-19 yang diungkapkan kemudian (Azwar Hayat, 2020), terungkap bahwa Provinsi Makassar dan Gowa memiliki jumlah kasus terkonfirmasi positif yang signifikan. Data dari Tanggap Sulsel Covid-19 pada tanggal 29 Juni 2020 mencatat bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki total 4.995 kasus positif Covid-19 dan 164 orang meninggal. Dengan data ini, Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat dalam jumlah kasus Covid-19, dan mayoritas kasus dilaporkan berasal dari penduduk setempat.

Berdasarkan penelitian (Aswandi & Nur Marwah Puteri Madjid, 2020), berlandaskan data yang ada, diperkirakan jumlah kasus positif Covid-19 di Makassar, Sulawesi Selatan, mencapai 3.028 orang. Panakkukang menjadi satu-satunya kota di wilayah tersebut yang kerap menunjukkan kasus positif Covid-19. Sekitar 346 warga komunitas ini saat ini terlibat dalam proses. Dari total tersebut, sekitar 1.984 orang aktif bekerja di rumah isolasi, 616 orang tinggal di rumah sakit, dan 1.368 orang masih melakukan pekerjaan mandiri di rumah. Pandemi Covid-19 di Makassar mendorong pemerintah menerapkan undang-undang yang mewajibkan masyarakat umum untuk melaksanakan tes Covid-19 dan mendapatkan hasil dari tes Covid-19 tersebut.

Menurut penelitian (Sahtiani Jahrir et al., 2021), setelah Kota Makassar diidentifikasi sebagai salah satu tempat dengan ambang penyebaran tertinggi, pemerintah Kota Makassar menerapkan program yang dikenal dengan istilah "kegiatan di dalam rumah", yang setara dengan "kegiatan di luar rumah". rehabilitasi sosial dan fisik." Hal ini terlihat dari maraknya karantina bendera di berbagai wilayah Kota Makassar serta pemasangan spanduk larangan di wilayah tersebut. Spanduk merupakan salah satu jenis informasi yang mempunyai ciri-ciri anjuran, ajakan, larangan, dan pengaruh. Hal ini juga mempunyai dampak yang lebih besar ketika menyebarkan informasi kepada masyarakat umum.

Menurut penelitian (Yusriani, 2020), dampak terbesar yang dialami masyarakat Kota Makassar adalah pembatalan pembelian akibat krisis pandemi Covid-19. Masyarakat di berbagai wilayah Kota Makassar saat ini sedang mengalami pandemi karena seringnya menerima informasi yang tidak jelas atau menyesatkan dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap informasi Covid-19 dari pemerintah dan banyaknya informasi yang tidak dapat diandalkan dari berbagai sumber berkontribusi terhadap terjadinya pembelian yang membuat masyarakat dalam keadaan panik, yaitu sebagian besar masyarakat membabi buta membeli bahan makanan yang akan disita jika semua toko tutup pada waktu yang tidak diketahui.

Secara lebih rinci, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurnainah, 2021) mengenai kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Makassar, menunjukkan bahwa menjaga pola hidup sehat dan aman menjadi tanggung jawab utama bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan virus memiliki kemampuan untuk tetap aktif di berbagai permukaan selama beberapa jam, dan inaktivitasnya hanya dapat dicapai dengan menerapkan bahan tertentu seperti alkohol, sabun, dan bahan disinfektan lainnya. Masyarakat diimbau mengonsumsi makanan sehat dan bergizi guna melindungi tubuh dari segala virus dan meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus COVID-19. Secara umum, generasi muda diaspora belum memahami bagaimana menjalani hidup sehat dan bahagia; sebaliknya, mereka hanya membeli barang-barang yang menarik bagi mereka dan tidak mempertimbangkan konsekuensi pembelian mereka. Di masa pandemi ini, memberikan informasi dan edukasi kepada anak agar tidak gampang terserang penyakit dan virus sangatlah penting.

Wikipedia, sebagai ensiklopedia daring yang bebas diakses, memiliki dampak pada sektor pariwisata, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Agus Prayudi, 2020). Sejak kasus pertama Covid-19 teridentifikasi pada akhir Desember 2019, pandemi ini telah menyebar ke seluruh dunia dan masih berlanjut. Pada tanggal 3 Agustus 2020, tercatat 18.219.002 (18,2 juta) kasus infeksi Covid-19 yang terkonfirmasi secara global. Angka kematian mencapai 692.309, sementara 11.435.236 (11,4 juta) orang berhasil sembuh dari virus tersebut. Lebih dari 6 juta kasus aktif masih dipantau, dengan 6.091.457 (6,09 juta) kasus, termasuk 6.025.656 (6,02 juta) kasus dalam keadaan moderat atau tanpa gejala, dan 65.801 kasus sedang dirawat di rumah sakit.

Lebih lanjut, survei tersebut menyatakan bahwa jumlah keseluruhan kasus Covid-19 di Amerika Serikat adalah 4,8 juta, dengan Brasil, India, Rusia, dan Afrika Selatan berada di belakangnya. Jumlah kasus Covid-19 telah meningkat di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Menurut catatan resmi Indonesia dari bulan Agustus 2020, ada tambahan 1.519 kasus Covid-19 yang diterima, meningkatkan jumlah total kasus Covid-19 yang terverifikasi di Indonesia menjadi 111.455 kasus. Selain itu, jumlah korban meninggal dunia meningkat sebanyak 43 orang, sehingga totalnya menjadi 5.236 orang. (M. Agus Prayudi, 2020) melaporkan bahwa 68.975 pasien Covid-19 telah dikatakan sembuh setelah memperoleh perawatan di fasilitas tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Galieh Gunagama et al., 2020), pandemi global yang melanda seluruh dunia telah memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi secara global. Sektor pariwisata, menurut sebagian besar analisis ekonomi, adalah salah satu sektor ekonomi yang paling berakibat. Banyak calon wisatawan yang terpaksa memutuskan rencana kunjungan mereka ke Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di berbagai daerah karena diberlakukannya pembatasan sosial yang secara nyata membatasi mobilitas masyarakat, termasuk larangan perjalanan dan larangan berkumpul dalam jumlah besar. Pengelola OTDW pun telah mengambil keputusan untuk membatasi akses bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai langkah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Diperkirakan jumlah wisatawan mancanegara akan mengalami penurunan sekitar 20% hingga 30% pada tahun 2020, berdasarkan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO). Dampak ini berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi global sekitar \$300-450 miliar dalam sektor ekspor pariwisata internasional.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Silfia et al., 2021), bisnis pariwisata diketahui mempunyai efek yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan alam, penduduk lokal, dan para pengunjung. Proses pembaharuan dalam produksi yang diperlukan untuk menciptakan produk dan layanan bagi para wisatawan dan pemangku kepentingan pariwisata membawa dampak yang beragam, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh terhadap pengembangan destinasi pariwisata, manajemen pariwisata, dan pemantauan operasional pariwisata yang sedang berjalan. Penggunaan metode ini sangat disarankan dalam perumusan strategi pariwisata, baik di tingkat nasional dan lokal, maupun dalam konteks perjanjian internasional.

Terlebih lagi, sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan seiring dengan visi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Bidang pariwisata, yang mencakup area rekreasi, perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai jenis perdagangan lain yang memperluas cakupan pariwisata (Irma Dwina, 2020), telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu negara.

Menurut penelitian (Masbiran, 2020), pengaruh Covid-19 terhadap pariwisata dapat dideteksi dari turunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Penurunan kondisi kerja di bisnis pariwisata dimulai dari kontraksi sektor transportasi, serta penyediaan tempat tinggal, makanan, dan minuman. Karena penurunan pendapatan dan kerugian hingga terjadi kebangkrutan karena kurangnya pendapatan perusahaan. Sehingga pengusaha pariwisata mengalami kesulitan untuk mendanai operasi bisnis mereka. Pariwisata dan bisnis yang terkait dengannya sangat rentan terhadap bencana semacam

wabah penyakit atau pandemi. Penyusutan di sektor pariwisata memiliki dampak negatif pada usaha kecil dan menengah (UKM) serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Industri pariwisata, dalam konteks penciptaan lapangan kerja dan kedamaian masyarakat, merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak paling besar. Jika salah satu bisnis di sektor pariwisata mengalami penutupan, akan menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan bagi mayoritas masyarakat.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut Pasal 10 UU Pariwisata tahun 2009, destinasi pariwisata adalah kawasan geopolitik utama yang terletak pada satu atau lebih wilayah administratif. Memiliki kegiatan pariwisata serta fasilitas umum. Fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan kedekatan komunitas. Menurut penelitian (Wilopo & Hakim, 2017), komponen utama pengembangan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Atraksi yang meliputi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai sifat bawaan dan spontanitas.
2. Aksesibilitas, yaitu meliputi tersedianya sistem transportasi dan fasilitas yang mudah digunakan.
3. Fasilitas seperti Wi-Fi hotspot dan fasilitas pendukung.
4. Sarana umum yang mendukung program sosialisasi kepada masyarakat (Ancillary Service).
5. Lembaga yang mempunyai karakter moral yang kuat, integritas yang teguh, dan memiliki strategi untuk mendukung kegiatan operasional pariwisata.

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut angka yang telah dirilis sebelumnya, virus Covid-19 mempunyai efek yang cukup besar terhadap bisnis pariwisata (Massidda et al., 2022). Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan pariwisata terkait erat dengan subjek pariwisata. Keduanya saling terikat, namun memiliki arti yang berbeda. Menurut UU Kepariwisata No. 10 tahun 2009, definisi pariwisata lebih menitik beratkan pada aspek mobilitas fisik atau perjalanan. Sementara itu, konsep pengertian pariwisata menekankan beragam kegiatan yang terkait dengan wisata, yang diakomodasi oleh beraneka fasilitas dan layanan. Pariwisata lebih rumit, mencakup semua kegiatan terkait dengan wisata dan penyediaan beraneka fasilitas serta layanan pendukung lainnya seperti penyediaan berbagai cinderamata, atraksi, penginapan, dan kebutuhan lainnya (Suharsono et al., 2021). Berbagai modifikasi wajib dilakukan selama pandemi ini, terutama dalam layanan pariwisata yang didukung oleh teknologi isu dan komunikasi, perihal rencana pengelolaan destinasi pariwisata pasca pandemi. Aktivitas pariwisata, jika tidak dikelola dan dikontrol dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai akibat negatif (Jasman, 2017), dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:

1. Pariwisata berpotensi merusak lingkungan;
2. Pariwisata di tangan orang asing;
3. Mengubah tujuan kesenian dan upacara adat;
4. Lingkungan yang tidak dilestarikan dengan baik; dan
5. Meningkatnya pencurian benda-benda tua bersejarah.

Menurut (Tobamba et al., 2019), "eksploitasi sumber daya alam semakin berkembang untuk mencukupi bahan dasar industri." Di sisi lain, produk industri, seperti asap dan sampah, mulai merusak kualitas lingkungan. Kehidupan manusia sekarang harus bertahan selama Tuhan menghendaki. Manusia dan lingkungan bekerja sama untuk menciptakan biosfer yang saling menguntungkan. Alam memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, mentalitas dan perilaku eksploitasi yang berlebihan harus diubah. Karena alam adalah "teman kita", alam harus dilindungi, dikelola, dan dijaga.

Menurut (Fitri, 2016), berbagai contoh kerusakan lingkungan yang terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Menurut (Sunaryo, 2013), kerusakan lingkungan hidup meliputi

hal-hal berikut: (1) Pencemaran air tanah, (2) Pencemaran udara, (3) Kebisingan udara, (4) Pencemaran bentang alam, (5) Masalah sampah, (6) Kerusakan lingkungan, (7) Bencana lingkungan, (8) Kerusakan situs dan peninggalan bersejarah, dan (9) Masalah tata guna lahan.

Menurut (Suharsono et al., 2021), prinsip dasar dari penerapan tata kelola pariwisata yang baik. Yaitu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara berbagai pemangku kepentingan, serta keterlibatan partisipasi aktif yang bersinergi (terintegrasi dan saling memperkuat) antara pemerintah, sektor swasta/industri pariwisata, dan masyarakat lokal yang terkait. Sudut pandang ini menekankan pentingnya kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dalam memastikan keberlanjutan sebuah destinasi sehingga semua pihak diuntungkan. Oleh karena itu, pengembangan destinasi dan pariwisata di masa depan (pasca pandemi) harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan, merawat, dan menjaga lingkungan agar kegiatan pariwisata dapat terus berjalan dan berkualitas.

Menurut penelitian (Suharsono et al., 2021), wabah ini juga meminta kita untuk mempertimbangkan dan menerapkan kembali "gotong royong." Gotong royong adalah salah satu elemen dari sistem keterlibatan masyarakat kita yang semakin terabaikan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali berperan, saling membantu, saling menjaga, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika ada salah satu warga di sekitar kita yang terserang/terpapar Covid 19 dan ditempatkan di isolasi mandiri, maka warga yang lain melakukan berbagai langkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Demikian pula dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata, para pemangku kepentingan harus mulai dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab terhadap lokasi yang mereka kunjungi.

Strategi Daya Tarik Wisatawan

(Ayu Putu Suciati et al., 2021) melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh setiap sektor industri di Indonesia. Terdapat kurangnya pemahaman mengenai dampak ini pada sektor pariwisata, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri lain seperti perhotelan, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terutama di bidang produksi makanan dan minuman, penginapan, dan perjalanan wisata. Dalam menghadapi tantangan ini, selama masa pandemi COVID-19, industri di Indonesia secara umum memerlukan tiga strategi yang mencakup hal-hal berikut:

Strategi Jangka Pendek

Ayu Putu Suciati et al. (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa strategi jangka pendek dalam pemulihan sektor pariwisata dapat diimplementasikan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah melalui inisiatif pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap sektor swasta, khususnya dalam bentuk dukungan finansial maupun operasional. Selain itu, penyusunan prosedur operasional standar untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 juga menjadi langkah penting.

Penerapan protokol kesehatan di kawasan destinasi wisata bertujuan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh elemen yang terlibat, baik wisatawan maupun masyarakat lokal. Dalam konteks ini, ditekankan pula pentingnya peran Destination Management Organization (DMO), terutama yang berfokus pada pengelolaan Desa Wisata. DMO berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional destinasi dan menjaga keberlanjutan layanan pariwisata.

Lebih lanjut, agen perjalanan berperan aktif dalam mengumpulkan informasi, membangun komunikasi langsung dengan staf destinasi, serta mendorong inovasi produk melalui pengembangan program pariwisata digital. Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan pelanggan juga menjadi perhatian penting, terutama dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi staf internal seperti pemandu wisata.

Kesejahteraan dan kenyamanan para pekerja, termasuk pemandu wisata, akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Dengan demikian, DMO yang dikelola secara profesional dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas dan keberlanjutan pariwisata di destinasi tersebut.

Strategi Jangka Menengah

Hal ini dapat dicapai melalui strategi *penthahelic*, yaitu strategi kerjasama antara media, akademisi, bisnis, pemerintah, dan pelanggan (ABGCM).

1. Peran Perguruan Tinggi
SDM, dan Riset adalah mengidentifikasi keinginan industri Pariwisata, khususnya dalam menciptakan program kajian destinasi dan Bisnis Pariwisata untuk melaksanakan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri Pariwisata .
2. Kebijakan Peran Nasional Pemerintah,
Yang pada pokoknya dituangkan dalam Peta Jalan Pembangunan Sektor Swasta. Di era digital ini, pemerintah mendorong media untuk terlibat dalam diskusi media sosial mengenai isu-isu terkait industri pariwisata dan perluasan program promosi pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah harus menghormati warga negara atau masyarakat dalam proses peningkatan pariwisata (Ayu Putu Suciati et al., 2021).

Strategi Jangka Panjang

Sebagaimana disampaikan (Ayu Putu Suciati et al., 2021), tugas pertama dalam strategi ini adalah mengoptimalkan sistem manajemen operasional industri pariwisata yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome.

1. Salah satu aspek yang sangat penting yang perlu ditangani adalah meningkatkan standar kualitas destinasi; meningkatkan standar kompetensi industri; dan menyediakan fasilitas berkualitas tinggi dan tahan lama.
2. Dalam konteks proses tersebut, penting untuk mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait industri pariwisata, kualitas layanan internal (termasuk fasilitas untuk karyawan), mutu layanan eksternal (seperti penyediaan fasilitas untuk para pekerja di sektor pariwisata), dan penyempurnaan program pemasaran yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
3. Sisi Output berupa rasa kesenangan, merasa puas dan loyalitas wisatawan
4. Wisatawan dapat kembali berkunjung dengan membayar lebih banyak uang, atau lebih banyak Dolar, melalui praktik manajemen yang efektif, yaitu Total Quality Management.

Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut penelitian (Di Gennaro et al., 2020), protokol kesehatan perlu dipatuhi untuk mencegah penyebaran virus Corona. Hal ini harus dilakukan karena saat ini belum ada antivirus khusus yang dapat digunakan sebagai vaksinizer. Mengingat hal tersebut, masyarakat harus memahami dan menggunakan beberapa protokol kesehatan di masa pandemi virus Corona. Terkait destinasi pariwisata, pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah terkait rencana mitigasi pandemi Covid-19 melalui program CHSE (Clean, Healthy, Save, Ecological). Selain itu, menerapkan lima protokol kesehatan sebagai berikut: (1) Penggunaan masker; (2) Mencuci tangan; (3) Jaga jarak; (4) Menghindari kerumunan dan (5) Mengurangi mobilitas. Penting untuk meyakinkan para pelancong (wisatawan) bahwa destinasi yang dibicarakan aman, apalagi mengingat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk melaksanakan penerapan proses tersebut di atas, harus disediakan tenaga dan sarana pendukung.

Temuan penelitian (Suharsono et al., 2021) tidak boleh terbatas pada grafik atau gambar, tetapi juga harus mencakup anotasi yang mudah dicontoh oleh masyarakat seperti, sarana cuci tangan yang mudah dinavigasi, pengukur suhu, dan masker yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, ada juga upaya pembatasan pengunjung

di tempat umum seperti pasar, mall, cafedan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan berlebih.

Protokol terkait kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah etika saat batuk dan bersin. Pastikan untuk memperhatikan secara detail dan tegas tindakan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa virus Corona dapat menyebar baik melalui tetesan maupun kontak yang lambat (Singhal, 2020). Selain itu, beberapa kasus pasien infeksi virus Corona akhir-akhir ini muncul tanpa gejala apa pun (Gao et al., 2021). Dengan demikian, etika batuk dan bersin dapat menjaga masyarakat umum dari pasien yang tertular tanpa menimbulkan masalah yang mungkin menghalangi mereka untuk menjalani isolasi (Nishiura et al., 2020).

Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dilakukan sebelumnya telah kami kaji kembali secara mendalam, dapat ditarik kesimpulan bahwa wabah Covid-19 menimbulkan dampak buruk bagi negara Indonesia. Dampak buruk yang dimaksud ialah seluruh aktivitas dari sektor pendidikan, perekonomian, pariwisata, politik, dan kehidupan sosial seketika ambruk. Pariwisata yang menjadi bantuan pemasok devisa negara bagaikan roda mesin canggih yang terus berputar mendadak mandek tak menghasilkan apapun.

Pengunjung dari dalam maupun luar negeri berdasarkan data BPS 2022 tercatat nol pengunjung. Seluruh aktivitas masyarakat dilakukan secara *Work From Home* (WFH). Pariwisata kembali beroperasi setelah wabah Covid-19 mereda. Sehingga dilakukan penyusunan konsep pariwisata, pemulihan bencana Covid-19, mencari tahu kondisi pariwisata Kota Makassar selama Covid-19, dilakukan kembali pengembangan pariwisata berkelanjutan, strategi daya tarik wisatawan, strategi jangka pendek, menengah dan panjang, serta tetap memperhatikan secara ketat protokol kesehatan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata, khususnya di Kota Makassar. Penurunan jumlah wisatawan, pembatasan mobilitas, dan penutupan destinasi wisata menyebabkan perlambatan ekonomi lokal serta memengaruhi keberlangsungan usaha-usaha yang bergantung pada sektor ini. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merancang tiga fase pemulihan, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi, sebagai langkah sistematis menghadapi krisis. Dalam konteks lokal, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang telah diterapkan dengan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, penerapan protokol kesehatan, penguatan peran Destination Management Organization (DMO), serta adopsi inovasi digital dalam promosi dan pelayanan wisata. Keseluruhan strategi ini menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata pascapandemi harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Sebagai saran, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata perlu memperkuat sinergi untuk menciptakan tata kelola destinasi yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi krisis serupa di masa depan. Penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE harus terus dijaga agar tercipta rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, edukasi keberlanjutan, dan digitalisasi sektor pariwisata perlu ditingkatkan agar pelaku usaha kecil dan pemandu wisata mampu bersaing di era baru pariwisata. Perencanaan pembangunan destinasi pun harus mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan budaya sehingga pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan identitas lokal. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan konkret melalui insentif, infrastruktur, serta kampanye promosi wisata berskala luas untuk mempercepat pemulihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan literature review yang sepenuhnya bergantung pada data sekunder. Analisis yang dilakukan

bersifat deskriptif-teoretis dan belum menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara utuh terhadap dinamika sektor pariwisata di Kota Makassar. Untuk memperkaya temuan dan meningkatkan validitasnya, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif maupun campuran (mixed-method) melalui survei, observasi, atau wawancara mendalam kepada pelaku pariwisata, wisatawan, dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini akan menghasilkan data yang lebih akurat, kontekstual, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pemulihan pariwisata yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdurachmat, I., & Maryani, E. (1997). *Geografi Ekonomi*. Jurusan Pendidikan Geografi, FPIPS IKIP Bandung.
- Adam, R., & Info, A. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Batu. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 6, Issue 3).
- Agung Nugroho, A., & Harrison, A. (2021). *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta*.
- Aswandi, R., & Nur Marwah Puteri Madjid, Z. (2020). MENILIK ATURAN RAPID TEST DI TENGAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR). <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di->
- Ayu Putu Suciati, D., Made Suadnya, I., & Pol Pemerintah Provinsi Bali, D. P. (2021). *STRATEGI PEMULIHAN PARIWISATA PASCA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI*.
- Azwar Hayat, A. E. P. L. H. A. H. A. M. S. N. A. G. A. D. dan A. S. (2020). *Minimalisasi Penyebaran COVID 19 Pada Lingkungan Pesantren, Sekolah dan Puskesmas Melalui Bantuan Alat Wastafel Portabe*.
- Blackstone W, C. & Hannay. (1830). *Commentaries on the Laws of England*.
- BPS. (2021). *2 Wisarawan Mancanegara Provinsi DKI Jakarta*.
- BPS. (2022). <https://sulsel.bps.go.id/indicator/16/1877/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-melalui-pintu-makassar-menurut-kebangsaan.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Statistik Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2021*.
- Chazdon, R. L., Lindenmayer, D., Guariguata, M. R., Crouzeilles, R., Rey Benayas, J. M., & Lazos Chavero, E. (2020). Erratum: Fostering natural forest regeneration on former agricultural land through economic and policy interventions (Environmental Research Letters (2020) 15 (043002) DOI: 10.1088/1748-9326/ab79e6). In *Environmental Research Letters* (Vol. 15, Issue 9). IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab97cc>
- Code, D. (2020). *Infographics-Decoding The Economics Of COVID-19*. Dcode Economic & Financial Consulting.
- Cooper, C. , F. J. , G. D. , & W. S. F. (1993). *Tourism: Principles and practice*. London: Pitman Publishing.
- Coppola, D. (2006). *Introduction to international disaster management*. .
- Desy Tri Anggarini. (2021). *Upaya_Pemulihan_Industri_Pariwisata_Dala*.
- Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: A narrative review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health*

(Vol. 17, Issue 8). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/ijerph17082690>

- Effendi, I., Hariani, P. R., Utara, S., & Kapten Muchtar Basri No, J. (2020). *Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah*. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.5553>
- Fitri, P. N. (Putri). (2016). Mitos Perempuan Cantik dalam Visualisasi Buku Bacaan Anak "Cerita Asli Indonesia". *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(01).
- Galieh Gunagama, M., Naurah, Y. R., Ellyza, A., Prabono, P., Arsitektur, D. J., & Makassar, S. S. (2020). Pariwisata Pascapandemi: Pelajaran Penting dan Prospek Pengembangan. In *Agustus* (Vol. 5, Issue 2).
- Gao, Z., Xu, Y., Sun, C., Wang, X., Guo, Y., Qiu, S., & Ma, K. (2021). A systematic review of asymptomatic infections with COVID-19. In *Journal of Microbiology, Immunology and Infection* (Vol. 54, Issue 1, pp. 12–16). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.05.001>
- Hasdiansa, I. W., Hasbiah, S., Aslam, A. P., Fadilah Aswar, N., & Hamka, R. A. (2023). PENERAPAN STRATEGI DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA PROMOSI HOTEL MARIO INN DI KOTA MAKASSAR. In *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 01, Issue 01). <https://journal.unm.ac.id/index.php/Ininnawa>
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>
- I Made Ady Wirawan. (2016). KESEHATAN PARIWISATA: ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH TUJUAN WISATA. *Health Juni*.
- I Wayan Wiwin, Duta, D., & Denpasar, I. (2018). *Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali I Wayan Wiwin*.
- Imran Tajuddin, A. T. P. P. R. dan L. P. (2021). STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR DI TENGAH PANDEMI COVID -19.
- Irma Dwinda. (2020). MELEMAHNYA EKONOMI INDONESIA PADA SEKTOR PARIWISATA, AKIBAT DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19.
- Jamalina, I. A., & Wardani, D. T. K. (2017). Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) Dan Manfaat Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat Di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 71–85. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.4008>
- Jasman, S. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 19(1), 80–90.
- Kaniasari, D., Mardotillah, M., & Masatip, A. (2021). Penerapan Protokol Kesehatan Hotel sebagai Langkah Preventif pada Masa Pandemi. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 9(1), 36–43. <https://doi.org/10.36983/japm.v9i1.120>
- Kemenparekraf. (2020). *Buku Utlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia*.
- Leiper, N. (1989). *Tourism systems: An interdisciplinary perspective*. Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University.
- Lili Adi Wibowo. (2008). *USAHA JASA PARIWISATA*.
- M. Agus Prayudi. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. In *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan* (Vol. 3, Issue 2). www.google.co.id

- Masbiran, V. U. K. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(2), 148–164.
- Massidda, C. M., Piras, R. P., & Seetaram, N. (2022). Annals of Tourism Research Empirical Insights. *Journal Homepage*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2021.100032>
- Menkes RI. (2020). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- Nishiura, H., Kobayashi, T., Miyama, T., Suzuki, A., Jung, S. mok, Hayashi, K., Kinoshita, R., Yang, Y., Yuan, B., Akhmetzhanov, A. R., & Linton, N. M. (2020). Estimation of the asymptomatic ratio of novel coronavirus infections (COVID-19). In *International Journal of Infectious Diseases* (Vol. 94, pp. 154–155). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.020>
- Nurnainah. (2021). Edukasi Menggunakan Media Animasi Terhadap Kebiasaan Jajan Anak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 147–152. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>
- Pariwisata, W. (2013). *Pengertian Pariwisata*.
- Pitana, I. G. , & G. P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta.
- Priambodo, S. A. (2009). *Panduan praktis menghadapi bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Roland Berger GmbH. (2020). *Roland Berger GmbH. 2020. Our corona economic impact series - Part 2*.
- Sahtiani Jahrir, A., Ibnu Al Qadri, M., Rahmawati, dan, Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra, P., Negeri Makassar Jl Mallengkeri, U., Tambung, P., & Tamalate, kec. (2021). *Pengaruh Penggunaan Bahasa dalam Spanduk Lockdown Wilayah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar*.
- Sejati, A. E., Sugiarto, A., Anasi, P. T., Utaya, S., & Bachri, S. (2022). Tantangan filsafat geografi dalam perkembangan geografi terkini: Kajian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 126. <https://doi.org/10.22146/mgi.74942>
- Silfia, B., Utami, A., & Kafabih, A. (2021). SEKTOR PARIWISATA INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19. In *JDEP* (Vol. 4, Issue 1).
- Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). In *Indian Journal of Pediatrics* (Vol. 87, Issue 4, pp. 281–286). Springer. <https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6>
- Suharsono, Nugroho, A. Y. A., & Harrison, A. (2021). Strategi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Komunitas Pasca Pandemi Covid19. *Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1371–1384.
- Sunaryo, B. (2010). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. *Jurnal Gava Media*.
- Suwena, I. K. , W. I. G. N. , & A. M. J. . (2010). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Udayana University Press.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Tobamba, E. K., Siswono, E., Dasar, P., & Negeri Jakarta, U. (2019). PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR IPS DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR.
- Wahyuni, D., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., Jenderal, J., & Subroto, G. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19 Yogyakarta Tourism Recovery Efforts during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 12(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2502>
- WHO. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. World Health Organization.
- Wilopo, K. K., & Hakim, L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis* (, 41(1), 56–65.
- Wirawan, I. M. A. (2016). Kesehatan Pariwisata: Aspek Kesehatan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata. *Jurnal Arc Com Health*, 3(1), 9–14.
- Wisnu Hadi. (2020). Attraction of the Opak River Flow in the Yogyakarta Region as a Natural and Educational Tourism Destination. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11, 2655–5433. <https://doi.org/10.31294/khi.v11i1.7912>
- Worldometer, D. (2020). *COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC*.
- Yusriani. (2020). *Pengetahuan dan Tingkat Kecemasan Mempengaruhi Perilaku Panic Buying Selama Pandemi Covid-19*. 3(1).